LAPORAN AKHIR



EVALUASI INDEX
REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN TANGERANG

Ruang Rapat SINERGI - BAPPEDA TANGERANG
Komplek Perkantoran Tigaraksa - Jl. H. Samawinata Blok D - No. 1
Tigaraksa, 27 Juni 2023

Overview

Laporan Akhir
Index Reformasi Birokrasi
Kabupaten Tangerang 2023

01 **Pendahuluan**
Urgensi Evaluasi IRB
Tujuan & Output

02 **Literatur Review & Metode**
Kebijakan & Konsep
Kerangka Pikir Konseptual
Metode, Tehnik Pengumpulan dan Analisa Data

03 **Data dan Analisa**
Data lapangan
Analisa

04 **Penutup**
Kesimpulan
Rekomendasi

Urgensi Evaluasi IRB

TUGAS PEMDA

Salah satu tugas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang adalah untuk **mempercepat** terwujudnya **kesejahteraan** masyarakat

- meningkatkan **pelayanan publik**,
- **pemberdayaan** masyarakat,
- meningkatkan **partisipasi** masyarakat, dan
- meningkatkan **daya saing** daerah



Urgensi Evaluasi IRB

AKSELERASI TATAKELOLA

Reformasi Birokrasi mengakselerasi terwujudkanya tatakelola pemerintahan yang baik yang menjadi prasyratan efektifitas dan efisiensi pembangunan.

Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menetapkan beberapa kali pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peraturan Menteri (Permen) PANRB No. 26 tahun 2020 (tujuan ERB : **informasi implementasi, monitoring RA dan Rekomendasi**)



HASIL EVALUASI RB 2021 - 2022



NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI EVALUASI	
			2021	2022
A	**Komponen Pengungkit**			
	1. Pemenuhan	20.00	10.29	11.16
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10.00	3.97	6.88
	3. Reform	30.00	14.17	14.79
	Total Komponen Pengungkit	**60.00**	**28.43**	**32.83**
B	**Komponen Hasil**			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	7.95	8.09
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10.00	8.18	8.59
	3. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	7.01	7.51
	4. Kinerja Organisasi	10.00	7.27	5.72
	Total Komponen Hasil	**40.00**	**30.41**	**29.91**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100.00	58.84	62.74

note :

- KP meningkat 15,48%
- KH turun 1,6% (komponen kinerja organisasi 31,32%)

HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN 2021 - 2022



NO	HASIL ANTARA	SKALA	NILAI		KETERANGAN
			2021	2022	
1	Sistem Merit / KASN	0-400	276.00	296.50	↑ 20.5 / 400
2	ASN yang Profesional / BKN	0-100	41.44	56.80	↑ 15,38 / 100
3	Implementasi SPBE / KemenPANRB	0-5	2.99	2.66	↓ -0,33 / 5
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa / LKPP	0-100	70.31	68.70	↓ -1,61 / 100
5	Kualitas Pelayanan Publik / KemenPANRB	0-5	3.91	4.12	↑ 0.21 / 5
6	Maluritas SPIP / BPKP	0-5	3.00	3.00	-
7	Kapabilitas APIP / BPKP	0-5	3.00	3.00	-
8	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik / Ombudsman RI	0-100	84.27	88.54	↑ 4.27 / 100
9	Kualitas Pengelolaan Arsip / ANRI	0-100	81.35	80.29	↓ -1.06 / 100
10	Reformasi Hukum / KemenKumHAM	0-100	-	49.35	↑ 49.35 / 100

Rumusan

MASALAH & PERTANYAAN PENELITIAN





Rumusan Masalah

“Bagaimana pengaruh program-program RB dalam indikator komponen pengungkit terhadap sasaran hasil kinerja organisasi di Pemkab. Tangerang?”

Bagaimana implementasi program yang menjadi indikator area **(1) manajemen perubahan** (2) deregulasi kebijakan **(3) organisasi** (4) tatalaksana **(5)sumber daya manusia aparatur** (6) akuntabilitas **(7) pengawasan** (8) pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja organisasi Pemkab. Tangerang?

TUJUAN & MANFAAT



Tujuan

“menganalisis pengaruh program-program RB sebagai indikator komponen pengungkit terhadap sasaran hasil kinerja organisasi di Pemkab. Tangerang”



Manfaat

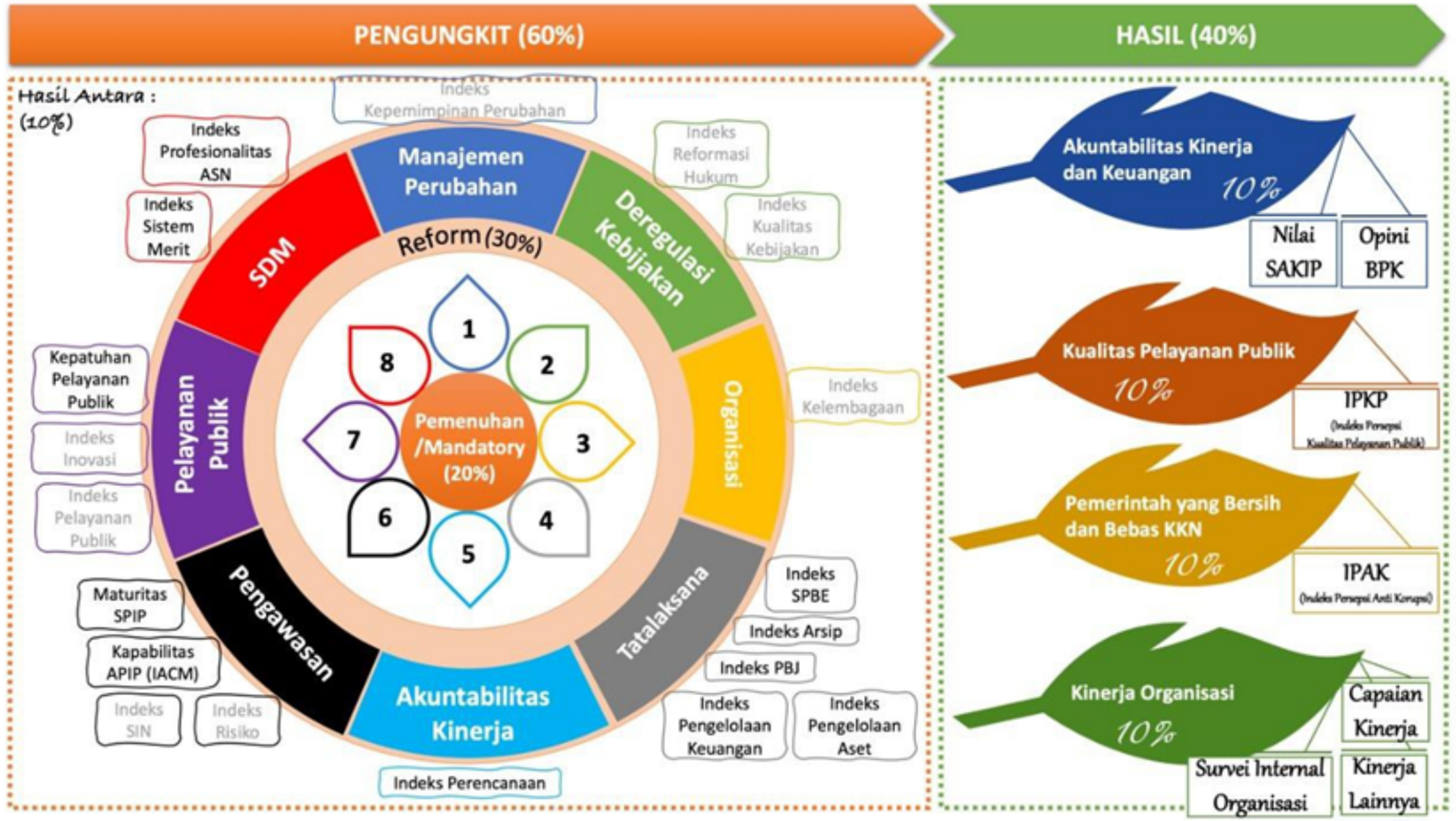
- **Informasi efektifitas program RB dalam meningkatkan kinerja organisasi**
- Rekomendasi program penting dalam meningkatkan kinerja organsiasi
- **Menambah literatur, kontribusi langsung peningkatan yanlik dan referensi riset selanjutnya.**

Output

Kegiatan EIRB

- Laporan Penelitian
- Jurnal / Artikel Ilmiah
- Policy Brief
- Expose





MODEL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIRORKASI

LITERATURE REVIEW

KEBIJAKAN

PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Refornasi Birorkasi 2020 - 2024

PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refornasi Birorkasi

Fungsi Roadmap dan Rencana Aksi dalam mendorong budaya kerja organisasi

Roadmap mendorong perubahan subtantif *Good Governance*, terintegrasi dengan budaya kinerja

KEBIJAKAN REVIEW

PermenPANRB No. 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refornasi Birorkasi

AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

Roadmap RB

identifikasi, analisis, dan pemetaan serta revisi kebijakan yang tidak harmonis / tidak sinkron/ bersifat menghambat.

harmonisasi terkait manajemen kinerja organisasi dan manajemen kinerja pegawai

KEBIJAKAN REVIEW

PermenPANRB No. 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refornasi Birorkasi

AREA DEREGULASI KEBIJAKAN

Indikator Harmonisasi

Penanganan Gratifikasi
Peran APIP dalam peningkatan kinerja
Manajemen pengaduan Masyrakat
Implementasi WBS dan ZI

LAKIP, Laporan Gratifikasi,
Laporan pengaduan masyrakat,
WBS dan ZI

KEBIJAKAN REVIEW

PermenPANRB No. 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Refornasi Birorkasi

AREA PENGAWASAN

Gratifikasi
Peran APIP
Penanganan Pengaduan Masyrakat
WBS
Zona Integritas

proses penyusunan rencana, pemantauan capaian kinerja berkala, kompetensi SDM tentang akuntabilitas kinerja

Keselerasan prencanaan, pemehaman komprehensif dan kontrol kinerja pegawai dan organisasi

KEBIJAKAN REVIEW

PermenPANRB No. 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refornasi Birorkasi

AREA AKUNTABILITAS KINERJA

Keterlibatan pimpinan
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

SOP base Bispro sesuai Renstra &
Integrasi Perencanaan, Penganggaran
dan kinerja

kualitas SOP, Bispro dan
Integrasi Sitem dalam
meningkatan kinerja organisasi

KEBIJAKAN REVIEW

PermenPANRB No. 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Refornasi Birorkasi

AREA TATALAKSANA

Standar Operasional Prosedur
Sistem Informasi

Standar kompetensi dan Bangkom Pegawai, Keselarasan kinerja individu dengan organisasi, SKP berbasis output, reward dan punishment

dukungan kualitas SDM dalam mencapai target SKP

KEBIJAKAN REVIEW

PermenPANRB No. 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refornasi Birorkasi

AREA SUMBER DAYA MANUSIA

Bangkom
Penetapan Kinerja Individu

Kesesuaian desain organisasi dengan kebutuhan untuk mencapai target yang dietapkan dalam Renstra

Rightsizing

KEBIJAKAN REVIEW

PermenPANRB No. 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refornasi Birorkasi

AREA ORGANISASI

Penataan Organisasi

Inovasi pelayanan publik dalam meningkatkan tatakelola dan pelayanan publik

Peningkatan kualitas kinerja organisasi

KEBIJAKAN REVIEW

PermenPANRB No. 26 Tahun 2020
Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refornasi Birorkasi

AREA PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik



konsep dan teori

TINJAUAN KONSEPTUAL

LITERATUR REVIEW

Konsep Reformasi Birokrasi dan Kinerja Organisasi

Manajemen Perubahan : Peta Jalan mewujudkan Kinerja Tinggi Organisasi

Deregulasi Kebijakan : Harmonisasi Manajemen Kinerja

Organisasi : Rightsizing Organisasi

Tatalaksana : Keselarasan Bisnis Proses, SOP, dan Rencana Strategis

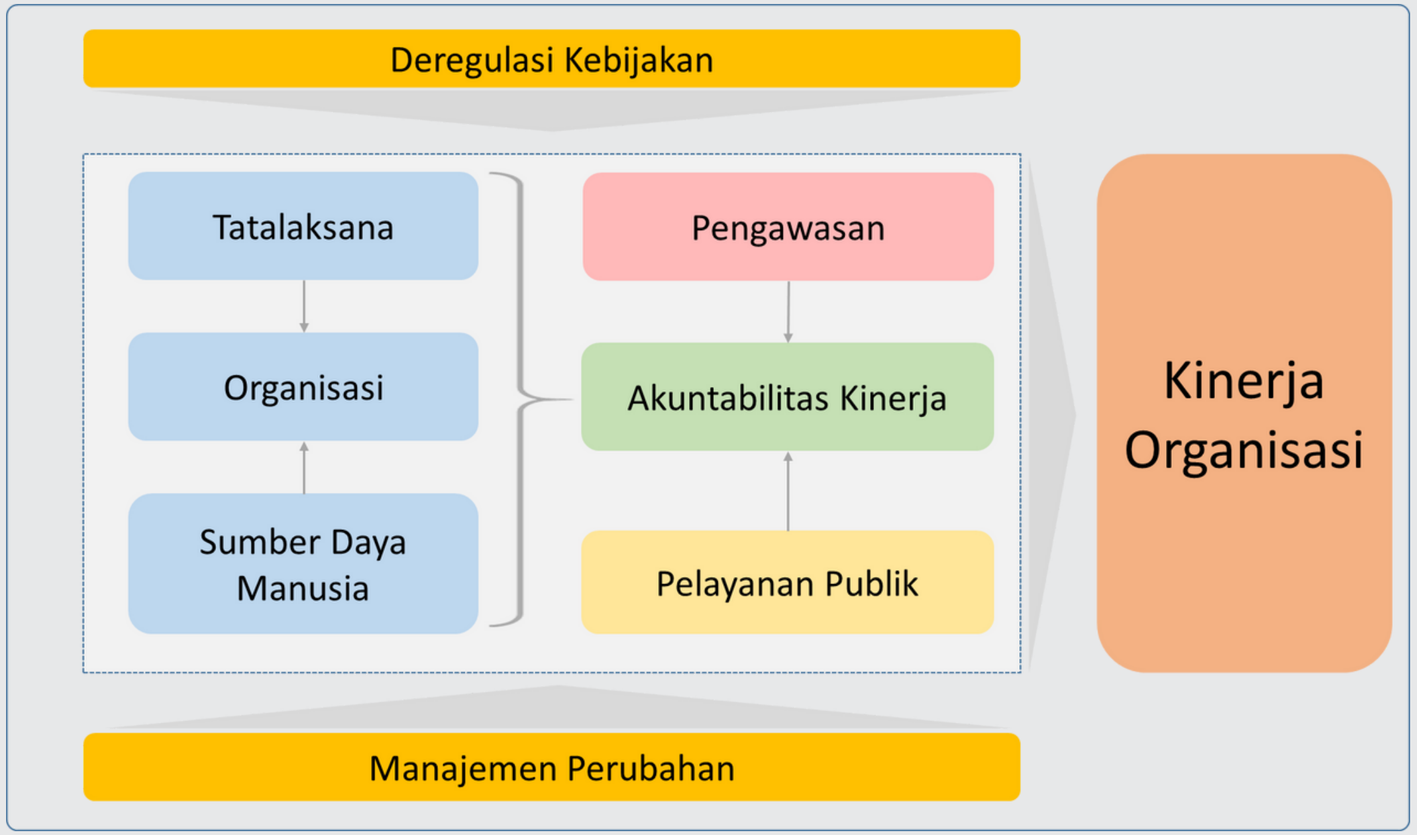
SDM Aparatur : Kesesuaian Pengembangkan Kompetensi Pegawai dan Jabatan

Akuntabilitas : Manajemen kinerja organisasi

Pengawasan : Pengendali mutu

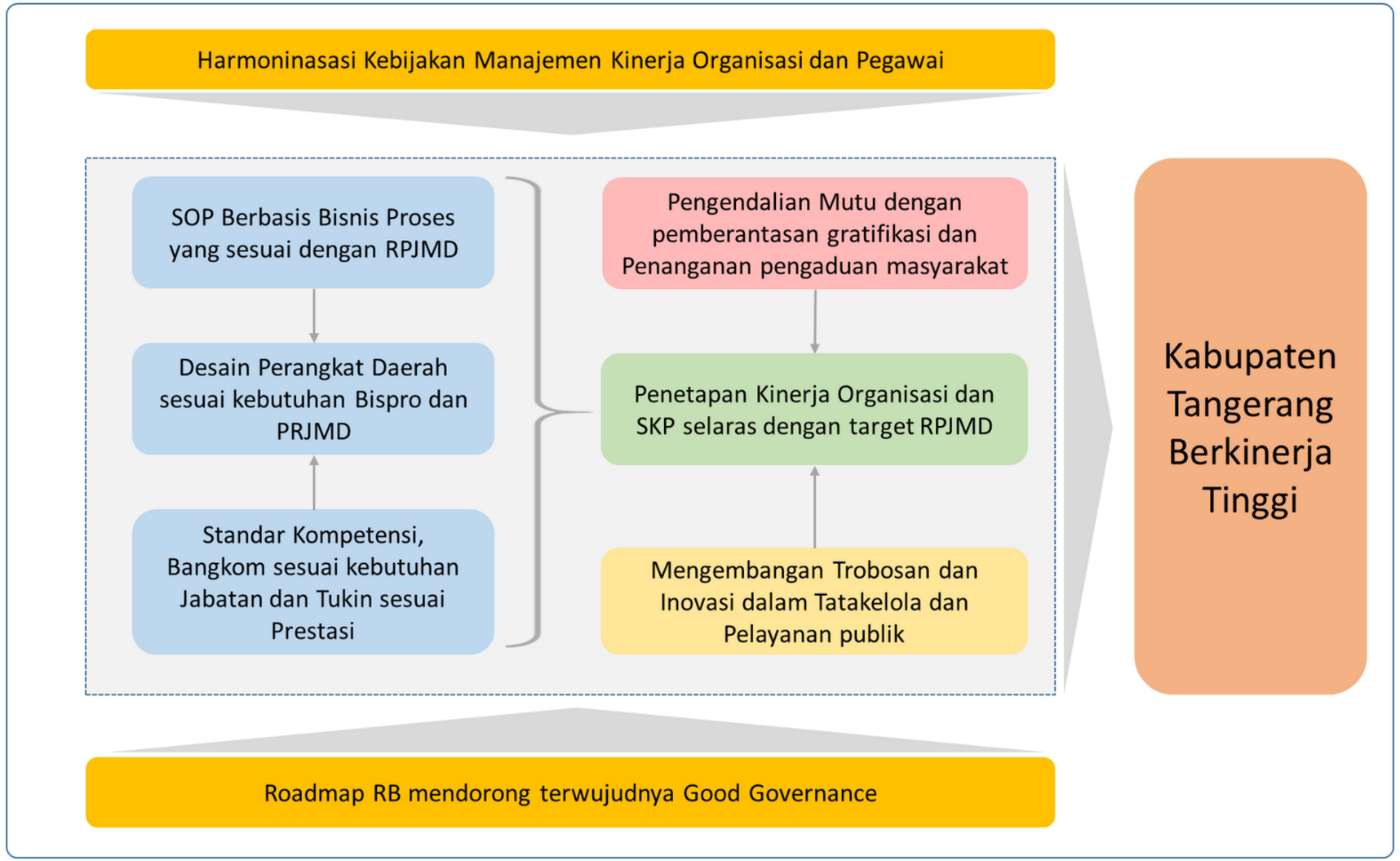
Pelayanan Publik : Trobosan dan Inovasi

Kerangka Pikir Konseptual





KERANGKA PIKIR OPERASIONAL





Metode Penelitian

Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk memahami suatu fenomena secara spesifik dan mendalam tentang suatu subjek atau kasus tertentu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti.

Identifikasi & Rumusan Masalah

Menentukan fokus kasus yang diteliti

Pengumpulan Data

Wawancara/FGD, Observasi dan Analisa Dokumen

Analisa Data

Pengorganisasian, pemilahan dan penyusunan temuan (Tematik)

Interprestasi & Simpulan

Deskripsi yang komprehensif dan menyimpulkan yang berhubungan dengan kasus





DATA & ANALISA

Manajemen Perubahan

Mendeskripsikan Data dan Analisa Implementsi RMRB dalam mewujudkan good gevernance dan budaya kerja organsiasi.

Deregulasi Kebijakan

Mendeskripsikan Data dan Analisa harmonisasi kebijakan manajemen kinerja organisasi dan pegawai dalam mewujudkan organisasi berkinerja tinggi

Organisasi

Mendeskripsikan Data dan Analisa penataan desain organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan Renstra dalam mewujudkan Rightsizing.

Tatalaksana

Mendeskripsikan Data dan Analisa Keselarasan Bisnis Proses, SOP, dan Rencana Strategis serta integrasi perencanaan, penganggaran dan kinerja dalam satu sistem

SDM Aparatur

Mendeskripsikan Data dan Analisa Kesesuaian Anjab, ABK, Pengembangkan Kompetensi Pegawai dan Jabatan, SKP, reward dan punishment

Akuntabilitas

Mendeskripsikan Data dan Analisa Manajemen kinerja organisasi

Pengawasan

Mendeskripsikan Data dan Analisa pemberantasan gratifikasi, praktek WBS dan pengaduan masyarakat serta implementasi WBK/WBBM

Pelayanan Publik

Mendeskripsikan Data dan Analisa implemetasi Trobosan dan Inovasi dalam meningkatkan kinerja.

MANAJEMEN PERUBAHAN

DATA LAPANGAN

- **RMRB** Perubahan Perangkat Daerah Kab.Tangerang menuju Good Governance **telah sesuai kebutuhan daerah dan PermenPANRB**

- **Belum memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dan berkelanjutan**, sehingga belum mampu menunjukan hasil dalam menggerakan perubahan pada lingkup organisasi

ANALISA

Pemenuhan dokumen Rencana kerja, sosialisasi/internalisasi sesuai dengan RMRB.

Peningkatan Implementasi rencana kerja perbuahan secara terukur, sistematis dan berkelanjutan.

Mengembangkan mekanisme kerja Agen perubahan dan tim perubahan reformasi birokrasi

DEREGULASI KEBIJAKAN

DATA LAPANGAN

- **Sudah ada harmonisasi terkait manajemen organisasi dan kinerja pegawai.**
- SAKIP dan LAKIP terkait penjelasan pengaturan kinerja Pemkab juga terkait dengan peraturan kinerja pegawai, Perbup tentang manajemen kinerja dan sipendekar, sebagai efidence dalam bentuk peraturan dan dokumentasi.

ANALISA

- Harmonisasi kebijakan secara subtantif, perencanaan, monitoring, evlauasi dan pelaporan kinerja organisasi dan pegawai.
- Sistem Informasi. Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) Kabupaten. Tangerang dan
- https://sipendekar.tangerangkab.go.id/

ORGANISASI

DATA LAPANGAN

- Mekanisme perubahan sturktur OPD mengikuti aturan hukum (PP 18 / 2016 dan Permendagri 5 /2017, dll)
- Sudah melakukan formulasi penyetaraan jabatan berdasarkan Peraturan Menpan melalui dokumen pendukung (PermenPANRB 28 / 2019 dan 17 / 2021)
- Tumpang tindih tugas antar OPD

ANALISA

Mendesain uraian tugas berdasarkan Bisnis Proses pemda level 1, 2, n dan SOP untuk output yang dihasilkan pemda.

TATALAKSANA

DATA LAPANGAN

- Penyusunan sudah sesuai dengan SOTK terbaru dan RPJMD kab Tangerang. beberapa PD yang sudah terintegrasi dalam tata laksana dan mendorong peningkatan nilai dari Indeks Kinerja Organisasi
- Sekda menyesuaikan proses bisnis yang ada, terkait perencanaan dan penganggaran sebelumnya sudah terintegrasi dalam satu sistem
- Belum dilakukan evaluasi Bispro dan SOP terkait dengan efektifitasnya

ANALISA

tahun 2020 dan 2021, bisnis proses belum tersusun dengan baik. hasil capaian kinerja pemda rendah.

Evaluasi pasca penyusunan Bispro dan SOP baru

SDM APARATUR

DATA LAPANGAN

- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan anjab dan abk.
- sudah ada Keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi
- sudah memiliki standar kompetensi (Perbup76 /2022 Standar Kompetensi JPT Pratama dan JA) pegawai dan sudah dilakukan pemetaan/ assesment pegawai
- Sudah melakukan penghitungan nilai kinerja individu berdasarkan prestasi kerja

ANALISA

- Penyusunan kamus kompetensi jabatan yang memuat beberapa aspek indikatoridentitas jabatan, kompetensi jabatan dan persyaratan jabatan

- Terdapat beberapa jabatan tidak sesuai dengan standar kompetensi (hard competence)

AKUNTABILITAS

DATA LAPANGAN

- e-SKIP untuk monev sedang dibangun
- Pelatihan penyusunan renstra untuk SDM di bagian perencanaan (pedoman akuntabilitas, review renstra, RPD dan LAKIP)
- Rekonsiliasi yang sudah dilakukan dalam pencapaian kinerja tiap semester

ANALISA

Peningkatan kualaitas pedoman dan internalisasi SAKIP

PENGAWASAN

DATA LAPANGAN

- kebijakan pengawasan internal (gratifikasi WBS) belum opetimal
- Untuk pemberantasan gratifikasi, sudah melakukan sosialisasi namun laporannya masih nihil
- Ada beberapa kasus namun tidak banyak, sehingga masih mencari formulasi untuk lebih efektif agar tetap bisa berjalan

ANALISA

trobosan peningkatan integritas dan kesadaran mewujudkan good governance

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Zona Intergritas

PELAYANAN PUBLIK

DATA LAPANGAN

- Sudah melakukan inovasi yang terimplementasi dalam lingkup antara lain :
- Pendidikan : sistem dalam mengimplementasikan inovasi di bidang Pendidikan
- Kominfo : Pelayanan data call center 112 untuk bencana alam dan lainnya, PPID spannafor
- Kesehatan : melalui puskesmas melayani Kesehatan pada ibu hamil di minimarket2 tersebut, survey kepuasan masyarakat berada diangka 84-86 meningkat dari tahun lalu

ANALISA

mendorong perkembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan pencapaian target prioritas daerah

Simpulan



Berdasarkan data dan analisa menyimpulkan bahwa secara administrasi formal, Program Reformasi Birokrasi pada delapan aspek (manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tatalaksana, sdm aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan capaian Kinerja organisasi telah lakukan dengan baik.

Namun secara kualitas hal yang dilakukan belum memberikan dampak nyata dalam peningkatan kinerja. Kebijakan manajemen kinerja belum terintegrasi; Agen Perubahan dan tim RB belum totalitas melakukannya; Uraian tugas belum jelas dan ego sektoral; Bisnis proses, SOP masih dalam proses; Ketidaksesuaian kompetensi dengan jabatan; Pemahaman SDM penanggunajawab SAKIP masih bervariasi; gratifikasi dan korupsi; dan inovasi sebagai kegiatan tambahan beban.



Rekomendasi

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja pegawai, beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai berikut :

- Harmonisasi Kebijakan Manajemen Kinerja Organisasi (SAKIP) dan Manajemen Kinerja Pegawai (SKP) yang disinergikan dengan data dasar (Perencanaan, Monev, kepegawaian, Keuangan, dll) TERMASUK MENGATUR REWARD & PUNISHMENT
- Mendorong Akselerasi Pemerintahan Berbasis Digital (SPBE) dengan Program RB Tematik, untuk mendorong percepatan terwujudknya Good Governance.

Thank You

atas kepercayaanya

